

**MEMPERBESAR TENTARA CADANGAN PEKERJA:
“BONUS DEMOGRAFI” DAN EKONOMI POLITIK NEGARA
NEOLIBERAL DI INDONESIA**

Arif Novianto

Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

Magister Administrasi Publik

Universitas Gadjah Mada

Email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The “Demographic Dividend” in which the proportion of people with productive age (between 15-65 years old) is larger compared to the non-productive one will reach its peak in 2035. This “bonus” is considered by mainstream economists as an opportunity to develop a strong national economy. Reports made by the World Bank, ILO, and Bappenas wrote that such “demographic dividend” would be the golden bridge in which a country could reach progress and prosperity. If such opportunity is exploited successfully, Indonesia could see rising wages and be transformed into an industrial country. Using the approach of political-economy, this article discusses the issues faced by the reserve army of labour with the government policies made to welcome “demographic bonus” and its relations with the neoliberal state. The findings of this article are: 1) there’s a stagnancy in the process of agrarian transformation and reforms; 2) the “demographic dividend” bounded within the framework of a neoliberal state have enlarge the number of precarious workers, which are tantamount as reserve army of labour; and 3) the massive reserve army of labour functions as a specific mechanism for capitalism to control wages and to depoliticise working-class movement.

Keywords: *Agrarian transformation; Demographic dividend; MEA; Neoliberal state; The reserve army of labour.*

ABSTRAK

“Bonus Demografi” atau besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 - 65 tahun) yang tengah terjadi di Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2035 dan dimaknai oleh ekonom mainstream sebagai peluang dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Dalam laporan dari Bank Dunia, ILO, dan Bappenas menyebut bahwa “bonus demografi” merupakan jembatan emas menuju kemajuan & kemakmuran. Indonesia jika mampu memanfaatkannya diyakini akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan dapat bertransformasi menjadi negara industri. Melalui analisa ekonomi politik tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi oleh tentara cadangan pekerja dalam kebijakan menyambut “bonus demografi” dan relasinya dengan negara neoliberal. Temuan dari tulisan ini adalah 1) adanya kemandekan dalam proses transformasi agraria; 2) “bonus demografi” yang terkerangkeng dalam kerangka negara neoliberal telah memperbesar pekerja rentan yang terejawantahkan dalam tentara cadangan pekerja; 3) tentara cadangan pekerja kemudian menjadi mekanisme khusus dari kapitalisme dalam mengontrol upah dan mendepolitisasi gerakan buruh.

Kata Kunci: *Bonus demografi; Negara neoliberal; Transformasi agrarian; Tentara cadangan pekerja.*

PENGANTAR

Piramida kependudukan Indonesia sejak tahun 2010, menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) sehingga menjadi lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk non-produktif. Pada tahun 2015 proporsi penduduk usia produktif Indonesia adalah 67,3%. Kondisi itu oleh ekonom mainstream disebut sebagai "bonus demografi" atau *demographic dividend* (Lee & Mason, 2006). Perubahan struktur kependudukan (demografi) tersebut juga berimplikasi pada menurunnya angka rasio ketergantungan menjadi 1,19% pada tahun 2015, puncaknya pada tahun 2035 yang mana angka rasio ketergantungan menjadi 0,6% (BPS, 2013: 31).

"Bonus demografi" yang tengah berjalan di Indonesia tidak berada di ruang kosong, tapi harus dihadapkan dengan tantangan multidimensional. Tantangan berupa kebijakan pasar tenaga kerja fleksibel yang telah membuat tidak adanya kepastian kerja bagi para buruh (Juliawan, 2010); proses *depeasantization* yang selama tahun 2003 - 2013 membuat sebanyak 5,07 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak lagi bertani (Sensus Pertanian, 2013); permasalahan pekerja rentan di sektor informal yang cukup besar; angka indeks ratio gini yang meningkat dari 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,402 pada september 2015 (BPS, 2016); kebijakan pembangunan yang lebih menopangkan diri pada *booming* komoditas dibanding industri manufaktur padat karya; serta permasalahan yang lain. Permasalahan tersebut hadir dan meluas seiring dinamika reorganisasi kapital yang terjadi di Indonesia dari masa orde lama menuju reformasi (Hadiz, 2013).

"Bonus demografi" sebagai fenomena dan realita sosial, setidaknya ada dua cara pandang utama untuk menganalisis, mendiagnosa, dan menjalankan langkah intervensi melalui resep-resep kebijakan. *Pertama*, pandangan instrumental yang diwakili oleh para ekonom liberal dan lembaga seperti Bank Dunia, ILO, IMF, dan juga Pemerintah Indonesia (Hayes and Setyonaluri, 2015). Cara pandang instrumental ini melihat bahwa besarnya

angkatan kerja produktif merupakan modal suatu negara untuk meningkatkan ekonomi mereka dan menjadi penopang menuju ke negara yang berbasis pada industrialisasi maju (Mason, 2005). Ekstraksi terhadap surplus tenaga kerja dimaknai sebagai mekanisme menggenjot ekonomi nasional. Sehingga karpet merah bagi proses akumulasi kapital menjadi piranti agar surplus tenaga kerja dapat terserap secara maksimal.

Mereka sering mencontohkan kasus di Korea Selatan dan Jepang pada pertengahan abad ke-20 yang mampu membangun ekonomi nasional dengan memanfaatkan "bonus demografi". Resep yang ditawarkan pada strategi untuk menyerap melimpahnya angkatan kerja produktif dengan moderasi kebijakan neoliberal. Hal itu dilakukan dengan cara membuka lapangan kerja, pasar kerja fleksibel, dan penguatan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan pasar tenaga kerja (BPPN, 2014).

Kedua, pandangan strukturalis. Melalui cara pandang ini maka unit analisis yang digunakan adalah sistem sosial dan relasi kekuasaan. "Bonus demografi" dilihat bukan sebagai realita sosial yang berjalan di ruang hampa, namun ada struktur dan ketimpangan kuasa yang menentukan kemana pendulum kebijakan merespon ledakan penduduk usia produktif ini berjalan. Ekonomi politik kekuasaan, idiologi yang dominan, dan juga relasi kelas sosial menjadi piranti kelas sosial mana yang akan diuntungkan dari langkah intervensi kebijakan yang dipilih.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kedua dalam menganalisis "bonus demografi" dan ekonomi politik Negara neoliberal. Berupaya menjawab pertanyaan tentang apakah benar melimpahnya angkatan kerja di Indonesia ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa Indonesia menjadi negara industrialisasi? Jika manfaat dari "bonus demografi" ini bergantung kepada kebijakan strategis pemerintah, maka mampukah kebijakan dalam moderasi negara neoliberal mengatasinya? Bagaimana struktur ekonomi Indonesia yang telah berjalan di bawah moderasi negara neoliberal? Siapa yang

diuntungkan oleh melimpahnya tenaga kerja tersebut? Dan apa implikasinya?

Populasi Manusia dan Kelangkaan: dari Pandangan Thomas Malthus, David Ricardo, dan Karl Marx

Pada tahun 1798 melalui esainya yang berjudul "*Principle of Population*", Thomas Malthus menjelaskan bahwa "*overpopulation*" merupakan ancaman utama terhadap keberlangsungan hidup manusia (Malthus, 1798). Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris yang hidup pada tahun 1766-1834 menakutkan bahwa terus meningkatnya angka populasi manusia akan mengarah ke kekacauan dan kesengsaraan. Pandangan Malthus tentang perkembangan populasi manusia ini sering disebut sebagai perspektif pesimistik.

Menurut Malthus angka peningkatan populasi manusia tidak dibarengi dengan tersedianya jumlah makanan di dunia, sehingga ledakan penduduk baginya adalah ancaman. Malthus menekankan pentingnya untuk melakukan pembatasan laju perkembangan populasi penduduk (Malthus, 1798).

Sementara David Ricardo melihat bahwa meningkatnya populasi manusia tidak akan serta merta membuat kelangkaan dalam pasokan makanan. Akan tetapi, melalui "*scarcity principle*" Ricardo melihat bahwa tanah akan menjadi semakin langka dibanding dengan barang-barang yang lain (Ricardo, 2001). Melalui hukum permintaan-penawaran, Ricardo memprediksi kelangkaan dalam bidang tanah telah membuat harga tanah dan sewa tanah kepada tuan tanah (*landlords*) menjadi terus naik hingga mencapai titik yang tidak dapat diakses masyarakat. Kelangkaan terhadap tanah ini yang menurut Ricardo akan mengganggu mekanisme pasar dan mengancam keberlangsungan hidup itu sendiri.

Pada perkembangannya baik prediksi Malthus dan Ricardo ternyata meleset (Piketty, 2014: 09). Terus meningkatnya angka jumlah penduduk tidak serta merta menimbulkan bencana kelaparan dan kesengsaraan. Laju pertumbuhan penduduk tidak diiringi dengan melambatnya laju bahan makanan.

Terjadinya kelangkaan bahan makanan, kelaparan, dan kesengsaraan tidak disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan secara struktural.

Di sisi yang lain meningkatnya populasi manusia tidak menjadikan sewa tanah lebih tinggi dibanding bentuk perkembangan dari kapitalisme seperti real estate. Justru nilai pertanian yang dalam hal ini menggunakan tanah sebagai sarana produksinya cenderung menurun. Kekurangan analisa dari Ricardo adalah tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan industrialisasi pada tahun-tahun paska tulisannya ditulis pada tahun 1810.

Karl Marx menggunakan analisis berbeda dalam melihat kelangkaan dan perkembangan populasi penduduk. Marx ketika dalam proses penulisan "*Das Kapital I*" yang terbit pertama kali pada tahun 1867 dihadapkan dengan sebuah sistem produksi yang baru yaitu kapitalisme (Marx, 1976). Proses industrialisasi yang dimulai di Inggris kemudian menyebar ke berbagai negara turut membawa proses penyingkiran masyarakat dari sarana produksi yang dimiliki (Engels, 2010). Hal itu disebut Marx sebagai akumulasi primitif yang kemudian membentuk dua kelas yang berkontradiksi, yaitu kelas borjuis (pemilik alat produksi) dan kelas proletar (yang tidak memiliki alat produksi dan hanya memiliki tenaga untuk bertahan hidup). Pertentangan kelas itu telah membuat adanya eksploitasi dan ketidakadilan oleh para borjuasi terhadap kaum proletar (Marx, 1976).

Dengan menganalisa hukum alamiah produksi kapitalisme, Marx menunjukkan bahwa yang menciptakan surplus nilai adalah tenaga kerja (kapital variabel) bukan sarana produksi (kapital konstan). Dalam corak produksi kapitalisme untuk menghasilkan laba maka terjadi pencurian surplus nilai dari para buruh. Hal itu yang mengakibatkan adanya eksploitasi dan alienasi. Hukum alami tersebut memaksa kaum kapitalis bersaing, saling mengalahkan, berekspansi dan mengakumulasi dalam hukum koersif kompetisi pasar (Marx, 1976).

Dengan meminjam analisa Ricardian tentang modal dan kelangkaan sebagai dasar analisis, Marx mencapai kesimpulan bahwa kapitalisme bekerja berdasarkan "prinsip akumulasi tak terbatas". Kecenderungan utama adalah modal akan menumpuk dan terkonsentrasi pada sedikit orang tanpa ada batas secara alami. Kesimpulan tersebut jelas berbeda dengan dua ekonom liberal yaitu David Ricardo dan Adam Smith yang mempercayai melalui *invisible hand* maka pasar sebagai *selfregulated system* mampu mencapai keseimbangan sendiri tanpa penyimpangan yang begitu besar (Harvey, 2010).

Perkembangan dari kapitalisme telah membuat semakin banyaknya penduduk yang sebelumnya produsen independen menjadi dipisahkan dari sarana produksinya (seperti tanah bagi petani). Karl Marx menjelaskan bahwa ekstraksi surplus tenaga kerja dalam kapitalisme membutuhkan kebebasan buruh dalam arti ganda, yaitu bebas secara politik untuk menjual tenaga kerjanya dan untuk itu maka harus bebas dari kepemilikan alat produksi (Marx, 1887: 270-280). Hal itu mengubah mereka menjadi manusia yang hanya memiliki tenaga saja untuk dipertukarkan dan agar dapat bertahan hidup. Melalui imperialisme, kapitalisme menyebar luas ke penjuru dunia (Lenin, 1999). Bekerjanya kapitalisme telah membuat mayoritas penduduk di dunia menjadi kelas proletar sementara hanya sebagian kecil dari penduduk yang menjadi kelas borjuis. Proses akumulasi kapital yang terus berjalan telah membentuk kapitalisme monopolistik tidak kapitalisme murni sebagaimana pada awal abad ke-19.

Mendefinisikan Tentara Cadangan Pekerja dalam Relasi Produksi Kapitalisme

Proses akumulasi primitif turut berkembang menjadi akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) telah menciptakan proletarisasi terhadap sebagian besar masyarakat (Harvey, 2003: 137-182). Para Petani yang terlempar dari sarana produksinya tidak lantas terserap dalam industrialisasi atau pekerjaan di inti kapitalisme. Keadaan itu membuat terbentuknya

pengangguran dan surplus populasi relatif atau yang oleh Marx juga disebut sebagai *reserve army of labour* atau tentara cadangan pekerja (Marx, 1976: 781-802). Penggunaan terminologi "tentara" (*army*) oleh Marx untuk merujuk pada para pekerja yang dikontrol dengan ketat di tempat kerja dan di bawah komando atau otoritas dari pemilik modal.

Istilah tentara cadangan pekerja bukan Marx yang pertama menggunakan. Sebelumnya istilah tersebut telah beredar dikalangan gerakan buruh Inggris pada tahun 1830an (Denning, 2010). Friedrich Engels pada tahun 1845 telah menggunakan dalam karyanya *The Condition of the Working Class in England*. Marx kemudian mulai memasukan istilah tentara cadangan pekerja dalam unit analisisnya pada Desember 1847 dalam karyanya yaitu *Wages*. Marx menulis sebagai berikut.

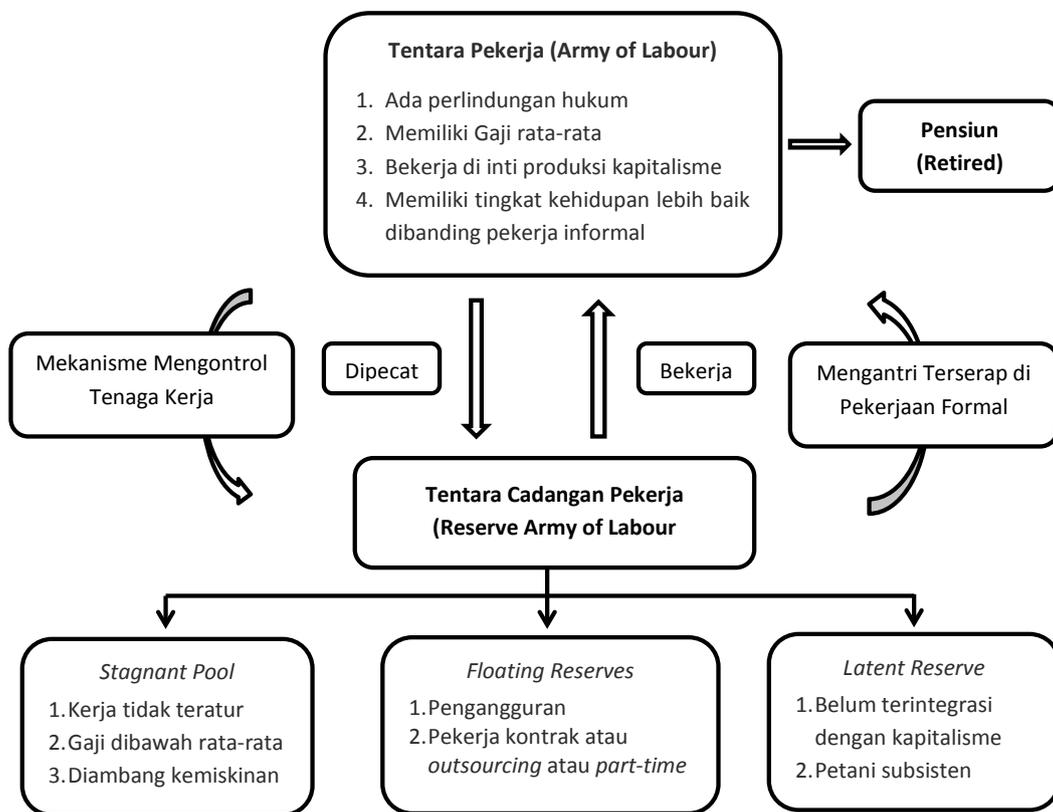
[...] tujuan utama dari borjuis dalam kaitannya dengan pekerja adalah, tentu saja, memiliki komoditas tenaga kerja semurah mungkin, yang hanya mungkin bila pasokan komoditas ini sebagai besar mungkin dalam kaitannya dengan permintaan untuk itu, yaitu, ketika kelebihan penduduk adalah yang terbesar. Oleh karena itu *overpopulation* adalah untuk kepentingan borjuasi... modal hanya meningkat ketika mempekerjakan pekerja, peningkatan modal melibatkan peningkatan proletariat... [...] (Marx, 1999).

Tenaga kerja dalam kapitalisme telah menjadi komoditi yang relasi produksinya berada dalam sirkuit C (*commodity*) – M (*money*) – C. Dalam sirkuit C – M – C itu dapat dijelaskan bahwa buruh menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan uang (*money*) dan melalui uang tersebut maka dapat digunakan untuk bertahan hidup hingga terciptanya tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru yang dimaksud adalah hasil dari mendapatkan uang akan digunakan untuk bereproduksi agar tenaga dari buruh pulih kembali untuk bekerja pada hari-hari kedepannya. Selain itu juga untuk bereproduksi dalam hal keluarga atau untuk memiliki keturunan-keturunan baru yang kemudian hari dapat menjadi pasokan tenaga kerja baru (reproduksi sosial). Itu berbeda dibanding sirkuit relasi produksi dari pemilik modal yaitu M – C – M + ΔM (Harvey, 2010: 87-92). ΔM adalah surplus nilai dari tenaga kerja

yang dicuri oleh para borjuis. Itu yang membuat proses modal bergerak dapat menjadi semakin terus membesar karena adanya surplus nilai itu.

Tentara pekerja dan tentara cadangan pekerja seperti dua sisi mata uang yang memiliki perbedaan mendasar. Tentara pekerja merupakan para buruh yang terserap dalam inti produksi kapitalisme (pekerja formal) sehingga mereka memiliki gaji di atas rata-rata, dilindungi hukum, jaminan kerja, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang layak. Sementara di luar pekerja formal tersebut adalah bagian dari tentara cadangan pekerja

meliputi pengangguran, petani kecil, dan pekerja di sektor informal. Marx membagi tentara cadangan pekerja dalam tiga kategori: *stagnant pool*, *floating reserves*, and *latent reserve* (lihat Gambar 1). Tentara cadangan pekerja ini memiliki kondisi hidup yang cukup memprihatinkan sehingga mereka terus berupaya bergerak berharap menjadi tentara pekerja (Neilson and Stubbs, 2011). Artinya tentara cadangan pekerja ini mengantri untuk dapat masuk dalam produksi inti kapitalisme. Bahkan mereka menyogok dan membayar suap agar dapat menjadi tentara pekerja.



Gambar 1. Relasi Produksi Kapitalisme Dengan *Army of Labour* & *Army Reserve of Labour*

Realita adanya tentara cadangan pekerja ini menurut Marx sebagai mekanisme khusus kapitalis untuk menjaga upah dari kenaikan di luar batas kondusif untuk profitabilitas modal (Marx, 1992). Adanya antrian tenaga kerja yang cukup besar juga merupakan mekanisme dalam kapitalisme yang menengahi permintaan dan

penawaran tenaga kerja serta memastikan bahwa upah riil disimpan dalam batas-batas yang menguntungkan untuk kebutuhan akumulasi modal (Basu, 2012).

Pergerakan modal telah menciptakan tentara cadangan pekerja dengan mekanisme industrialisasi (Marx, 1976: 557) atau

pertanian (Marx, 1976: 883) dan kemudian menggunakan cadangan pekerja tersebut untuk mendisiplinkan para buruh di *barak* industrialisasi. Pendisiplinan yang dilakukan seperti dengan membuat agar tentara pekerja bekerja lebih lama tanpa meminta kenaikan gaji, memperlemah perlawanan, dan membuat gaji buruh tetap pada kondisi yang menguntungkan bagi akumulasi modal (Pollin, 1998; Duggan, 2013).

Tentara cadangan pekerja ini karena kondisi kehidupannya yang cukup menyedihkan, maka sering juga disebut sebagai pekerja rentan. Jumlah mereka pada abad ke-21 ini terus mengalami peningkatan. Membludaknya *industrial reserve army* tidak dapat dipisahkan dari proses ekspansi dan evolusi dari kapitalisme global ke penjuru dunia (Neilson and Stubbs, 2011). Sementara itu Michael Denning melihat surplus relatif populasi atau tentara cadangan pekerja sebagai limbah (*waste*) atau tumpukan sampah (*the rubbish heap*) (Denning, 2010: 96). Mereka adalah hasil dari produksi limbah manusia yang terbuang dengan benar di dalam sistem kapitalisme ini. Adanya globalisasi dan modernisasi neoliberal juga mendorong melonjaknya “pengungsi, pencari suaka, dan imigran” yang sebagian besar adalah tentara cadangan pekerja (Bauman, 2014).

Negara Neoliberal di Indonesia dan Kebijakan Menyambut “Bonus Demografi”

Dalam pendekatan marxis, ada dua cara pandang utama dalam menganalisis negara. Pertama adalah pendekatan instrumental yang menempatkan negara sebagai alat kepentingan dari kelas dominan. Sedangkan kedua yaitu pendekatan strukturalis yang melihat negara sebagai lembaga yang memiliki otonomi relatif. Landasan pemahaman yang cukup penting dalam melihat negara yang diberikan Marx dan Engels adalah bahwa dengan sistem produksi yang berbeda maka akan menghasilkan bentuk negara yang berbeda dan perubahan metode produksi dan perimbangan kelas menentukan perubahan sifat kekuasaan negara (Novianto dkk, 2017).

Di tengah cengkeraman kapitalisme, maka posisi negara diterjemahkan dalam cara pandang liberal. Idiologi tersebut mengalami rekonstruksi paska krisis struktural ditahun 1970an dari liberalisme menjadi neoliberalisme yang merupakan tahap baru perkembangan kapitalisme (Duménil and Lévy, 2013). Pengusung gagasan neoliberalisme tersebut adalah Margaret Thatcher yang merupakan Perdana Menteri Inggris selama tiga periode dari partai Konservatif (1975 - 1990) dan Ronald Reagan yang merupakan Presiden ke-40 Amerika Serikat. Konsepsi terkenal mereka adalah tentang *there is no alternative* (TINA) dari neoliberalisme. Sementara Friedrich Hayek, Milton Friedman, dan Robert Nozick merupakan teoritisasi dari gagasan tersebut. Paska krisis ditahun 1970an tersebut, paham neoliberalisme dianut diberbagai penjuru dunia dengan pegangan utamanya melalui konsesus Wasington dan menjadi paradigma baru dalam merumuskan kebijakan publik (Gamble, 2001: 129).

Dalam konteks kebijakan, neoliberalisme ini mengganti pendekatan politik menjadi mekanisme ekonomi yang dinilai sebagai cara efisien untuk mengatur masyarakat (Davies, 2014: 08). Oleh karena itu, ideologi neoliberal berusaha untuk mendekonstruksi “bahasa politik” menggunakan model sistem harga pasar (Davies, 2014: 04). David Harvey menyebut peran negara yang memfasilitasi idiologi neoliberal ini sebagai “negara neoliberal”. Dalam teorinya, negara neoliberal ini haruslah mementingkan hak-hak milik pribadi individu, aturan hukum dan pranata-pranata pasar bebas serta perdagangan bebas, sebagai prasyarat mendasar bagi terciptanya kebebasan individu (Harvey, 2003: 107-108). Neoliberalisme lebih memfokuskan pada merekonstruksi kondisi seluas mungkin agar persaingan pasar berkembang dengan menghapus hambatan, tarif ekspor-impor, dan “memberdayakan pelaku pasar dengan mengurangi pajak” (Gamble, 2001: 132).

Pergeseran dari liberalisme menjadi neoliberalisme adalah bahwa liberalisme menempatkan posisi pemerintah menjadi sangat terbatas dan perannya diperkecil hanya

sebagai "anjing penjaga". Sementara dalam neoliberalisme peran pemerintah cukup aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif walaupun itu harus menanggalkan demokrasi (Harvey, 2003). Dengan cara ini, prinsip kebebasan, pasar yang kompetitif adalah yang terpenting dalam pemikiran neoliberal, dan neoliberalisme telah menjauhkan diri dari "versi dogmatis liberalisme" yang didirikan pada abad kesembilan belas (Dardot & Laval, 2013: 17).

Meskipun begitu negara neoliberal tidak selalu berpegang pada teorinya, seperti di AS ketika masa Presiden G. W. Bush yang menerapkan tarif impor untuk melindungi pabrik baja di Ohio. Juga seperti di Eropa yang melakukan subsidi terhadap pertanian di negaranya, padahal menekankan pada negara berkembang untuk mencabut subsidi pertanian (Harvey, 2003). Itu menunjukkan bahwa neoliberalisme ini merupakan proyek politik bagi terciptanya akumulasi kapital dan menciptakan kondisi bagi meningkatnya kekuasaan elit-elit ekonomi (*ibid*). Hal itu dapat terlihat dari peningkatan kekayaan dari para elit ekonomi selama proyek politik neoliberalisme ini dijalankan sampai di abad-21 sekarang (Piketty, 2014). Sementara itu upaya untuk terus menyemikan neoliberalisme turut berkelindan dengan meluasnya proses proletarianisasi yang menciptakan tentara cadangan pekerja. Relasi negara kapitalisme pusat dengan negara kapitalisme pinggiran telah menciptakan pembagian kerja secara global. Negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia menjadi pemasok bahan baku dan buruh murah bagi industri kapitalisme pusat (Smith, 2016) Ekonomi nasional yang lemah, menjadikan negara kapitalisme pinggiran memiliki tentara cadangan pekerja yang membludak.

Kebijakan Pemerintah Merespon "Bonus Demografi"

Indonesia kini tengah menghadapi fenomena "bonus demografi" yang diperkirakan akan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2035. Keadaan itu berjalan beriringannya dengan diterapkannya ekonomi regional

di ASEAN sejak tahun 2015. Melimpahnya angkatan kerja ini memberikan tantangan yang bersifat multidimensional. Apakah mereka mampu terserap dalam industri produktif atau cenderung menjadi masyarakat rentan di antara tentara cadangan pekerja. Apalagi penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN (BPPN, 2014: 48).

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam merespon "bonus demografi" dan salah satunya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

"Bonus demografi" tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana (BPPN, 2014).

Untuk menghadapi "bonus demografi" kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih bersandar pada penyiapan secara teknis dibanding melakukan terobosan secara politik. Itu kurang lebih menunjukkan watak dari negara neoliberal. Terjadi proses depolitisasi terhadap akar permasalahan publik (Novianto, 2015). Tidak ada analisis mengenai kondisi struktural terhadap permasalahan ketenagakerjaan dan kebijakan politik Indonesia. Jika merujuk data dari Sensus Pertanian (BPS 2013), selama tahun 2003 - 2013 terjadi proses *depeasantization* yang membuat sebanyak 5,09 juta rumah tangga petani di Indonesia tidak lagi bertani. Sebagian besar petani yang terlempar dari sarana produksinya adalah petani gurem (petani kecil dengan lahan kurang dari 0,5 ha). Pertanyaannya kemudian kemana perginya para petani beserta keluarganya yang merupakan tentara cadangan pekerja ketika mereka sudah tidak lagi bertani? belum ada data pasti terkait itu. Umumnya petani yang kehilangan akses langsung terhadap tanah

tidak dapat terserap di mana pun, baik di sektor ekonomi produktif pedesaan maupun perkotaan. Mereka pada akhirnya harus pasrah

bekerja dalam relasi produksi fleksibel di sektor informal yang diwarnai oleh tingginya kerentanan kerja (Habibi, 2016: 03).

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Dalam Memanfaatkan “Bonus Demografi”

Bidang Pembangunan	Kebijakan Strategis
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama	Menjaga penurunan tingkat fertilitas; Meningkatkan jaminan kesehatan Memperluas pendidikan menengah universal Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi Meningkatkan pelatihan ketrampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja Meningkatkan kewirausahaan, pendidikan karakter pemuda
Ekonomi dan Tenaga Kerja	Memperluas lapangan kerja Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menjamin ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi Menjamin ketersediaan energi untuk industri
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja Meningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan
Politik, Hukum, dan Keamanan	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangunan ekonomi (<i>inclusive grow</i>) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri
Pembangunan Wilayah, Tata Ruang, dan Sarana Prasarana	Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan interkoneksi antar wilayah Penataan ruang menghadapi urbanisasi Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktifitas

Sumber: RPJMN 2015-2019 (BPPN 2014).

Data dari *International Labour Organisation* (ILO) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 63 persen atau 70 juta angkatan kerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal (ILO, 2013: 12). ILO menyebut mereka sebagai “pekerja rentan” yang terabaikan hak-hak mendasarnya. Itu karena bekerja di sektor informal membuat mereka tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan sosial, pendapatan yang tidak menentu, relasi kerja yang longgar, dan pendapatan yang cenderung rendah (ILO, 2002). Sementara angka pengangguran pada tahun 2013 berjumlah 7,39 juta jiwa (BPS 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa

tentara cadangan pekerja mengisi mayoritas proporsi dalam “bonus demografi”. Mereka merupakan tenaga kerja produktif yang tidak terserap dalam sektor industrialisasi kapitalisme.

Industrialisasi yang Rapuh dan Pasar Kerja Fleksibel

Proses transformasi agraria di negara kapitalisme pinggiran tidak berjalan sebagaimana yang terjadi di negara kapitalisme pusat. Transisi dari modus produksi subsisten ke pekerja upahan, dari pertanian ke pabrik, dan dari pedesaan ke perkotaan tidak benar-

benar dapat berjalan di negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia (Habibi, 2016: 02). Proses tersebut menyisakan permasalahan yang cukup akut dalam ketenagakerjaan dan ekonomi secara makro.

Proses *depeasantization* tidak lantas membuat terjadinya transformasi agraria. Angkatan kerja produktif yang tersingkir dari sektor pertanian bukan semata karena mereka secara moral sudah tidak mau bertani atau karena pengaruh modernitas dan anggapan bahwa pertanian tradisional merupakan pekerjaan yang kuno. Akan tetapi dipengaruhi oleh faktor struktural dalam sektor pertanian. Dalam karyanya "*Power of Exclusion: Land Dilemmas of Southeast Asia*", Hall, Hirsch & Li (2011) menemukan kecenderungan bahwa pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam terciptanya *depeasantization*. Pola kesenjangan kepemilikan lahan telah menjadi permasalahan yang mencengkeram pertanian di desa-desa terutama yang dialami oleh para petani gurem (petani dengan lahan < 0,5 hektar). Dengan pengelolaan lahan pertanian yang sangat kecil maka kehidupan keluarga petani gurem menjadi rentan. Mereka merupakan bagian laten dari tentara cadangan pekerja yang juga tengah mencari-cari pekerjaan formal yang layak.

Sementara proyek politik neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah lebih menitik beratkan pada berjalannya akumulasi kapital sehingga distribusi kesejahteraan mandek. Berjuta-juta hektar tanah diberikan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan melalui konsesi dibanding melakukan distribusi tanah kepada masyarakat. Pembangunan industri lebih memfokuskan pada komoditi ekspor untuk kebutuhan pasar global. Pemerintah mendapatkan pajak dan devisa dari proses industri itu. Seperti dalam kasus perkebunan kelapa sawit, konsesi yang diberikan kepada Perkebunan Besar Swasta (PBS) seluas 5,97 juta hektar atau 52,83% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia (Ditjenbun, 2016). Produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) pada 2013 sebesar 25,5 juta ton (secara nasional) dan 21 juta ton CPO yang dihasilkan ditujukan untuk

pasar global (Sawit Watch, 2013). Di sektor pertambangan terhitung sampai tahun 2011 ada sebanyak 8000 izin tambang tercatat dikawasan hutan, 75 persen di antaranya tumpang tindih dengan peruntukan yang lain (Kompas, 2011). Dua ribu di antaranya berada di Kalimantan, lebih dari separuhnya berada di Kalimantan Timur.

Dalam penggunaan lahan (*land use*) Hall, Hirsch dan Li (2011) menjelaskan adanya mekanisme inklusi dan eksklusi. Ketika seseorang memperoleh kepemilikan dan penggunaan lahan, maka pasti ada orang yang ditutup aksesnya dari lahan tersebut. Hasil sensus pertanian (BPS 2013) menunjukkan terjadinya inklusi dan eksklusi di sektor agraria. Dari 5,09 juta keluarga pertanian yang tidak lagi bertani dalam kurun waktu tahun 2003-2013, sebanyak 5,04 jutanya merupakan keluarga pertanian dengan penguasaan tanah kurang dari 0,10 hektar. Selama rentang waktu 10 tahun tersebut, setengah lebih dari jumlah keluarga petani gurem yang tidak lagi bertani atau sekitar 53,75%, Pada sensus pertanian 2013 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah petani dengan kepemilikan lahan lebih besar dari 30.000 m² sebanyak 298.803 atau naik dari 1,309 juta ditahun 2003 menjadi 1,608 juta ditahun 2013. Itu menunjukkan bahwa mereka yang tereksklusi adalah para petani kecil.

Proses eksklusi rumah tangga pertanian dari sektor agraria pada kenyataannya tidak dibarengi dengan proses industrialisasi. Transisi dari modus produksi subsisten menuju pekerja upahan atau dari pertanian menuju pabrik tidak terjadi di Indonesia. Itu yang membuat begitu besarnya tentara cadangan pekerja dengan kondisi hidup yang begitu rentan. Industri manufaktur padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja masih sangat kecil untuk dapat menampung tentara cadangan pekerja yang cukup besar. Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi karena industri di Indonesia memang belum pernah besar. Hanya sejak terutama tahun 1990an berkembang industri manufaktur ringan, sementara paska-krisis ekonomi 1997/1998 hingga sekarang fokus kebijakan

pemerintah lebih pada sektor pertambangan dan perkebunan.

Industri manufaktur di Indonesia masih terbilang kecil karena hanya menyerap tenaga kerja sebesar 15.390.188 jiwa (BPS, 2014). Pertumbuhan lapangan kerja di sektor ini juga tidak berkembang signifikan (lihat tabel

2). Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan masih paling besar menyerap tenaga kerja, di mana sampai Februari 2014 tercatat lebih dari 40 juta jiwa bekerja didalamnya. Sementara posisi kedua ditempati sektor usaha perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi yang menyerap 25,8 juta tenaga kerja (Mantra, 2014: 31).

Tabel 2. Pertumbuhan dan Serapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur (Pengolahan) Indonesia 2004-2014



Sumber: (Mantra, 2014: 32)

Corak produksi dan struktur industri Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam jaringan kapitalisme global. Sektor industri masih bergantung pada ekspor barang-barang dalam kategori setengah jadi (*intermediate goods*) dan barang jadi pesanan dari luar negeri. Kondisi ini direpresentasikan dari kategori ekspor manufaktur Indonesia dari 1996-2008 misalnya, di mana 37,25 persen dari total ekspor manufaktur Indonesia adalah kategori barang yang berbasis intensifitas tenaga kerja tidak terampil (*unskillful labour-intensive-ULI*), dan 19,40 persen adalah kategori barang yang berbasis intensifitas sumber daya alam (*natural resources-intensive-NRI*) (Rahmaddi dan Ichihashi, 2012 dalam Mantra, 2014: 33-34).

Struktur industri dan permasalahan penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan pentingnya kebijakan perombakan industri strategis dalam menyikapi melimpahnya angkatan kerja produktif. Proses proletarisasi yang besar di sektor agraria tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja di sektor industri. Hal itu yang menyebabkan membludaknya pekerja di sektor informal dengan kondisi kehidupan yang serba kekurangan dan berada diambang kemiskinan.

Jika melihat kesuksesan pembangunan ekonomi di negara Asia Timur tidak lepas dari kemampuan negara untuk menciptakan perekonomian nasional yang kuat dan koheren

berdasarkan para relasi sehat antara dua pilar produksi: pertanian dan industri (Kay, 2009). Sebagaimana hasil dari penelitian Cristobal Kay:

[...] pembangunan industri memiliki potensi lebih besar mendorong inovasi teknologi, menangkap dinamika skala ekonomi dan menciptakan eksternalitas ekonomi. Industri juga dapat berkontribusi bagi pertanian dengan memproduksi mesin, perlengkapan, dan input modern. Sebaliknya, pembangunan pertanian juga amat diperlukan. Pertanian punya kapasitas potensi untuk menciptakan surplus.... Surplus ini kemudian dialokasikan untuk pengembangan industri (dalam Habibi, 2016: 22)

Dalam merespon "bonus demografi", kebijakan pemerintah lebih pada peningkatan fleksibilitas tenaga kerja dan mendirikan sekolah-sekolah vokasi (Antara News 2016). Kebijakan tersebut adalah upaya untuk menyiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Di sektor ketenagakerjaan permasalahan yang terjadi tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga tentang kesejahteraan kaum

buruh. Menjadikan pendidikan sebagai tempat mencetak peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri adalah bentuk pendistorsian hakikat pendidikan (Freire, 2008). Sementara fleksibilitas tenaga kerja merupakan strategi kepengaturan dari neoliberalisme yang selama ini dipromosikan oleh Bank Dunia dalam merespon kerentanan ekonomi global terhadap krisis (Juliawan, 2010).

Melalui kerja kontrak dan outsourcing yang menjadi piranti dalam pasar kerja fleksibel membuat buruh berada pada posisi yang semakin ter subordinat. Kaum buruh dalam relasi pasar kerja fleksibel ini berada dalam ketidakpastian masa kerja, sehingga berpengaruh dengan kondisi ekonomi dan tekanan reproduksi sosial. Sementara para pengusaha menjadi pihak yang diuntungkan dengan relasi kerja fleksibel ini. Moderasi kebijakan neoliberal pasar kerja fleksibel telah menjadikan jumlah *floating reserves* meningkat tajam dari 7.795.291 jiwa pada tahun 2006, menjadi 17.197.634 di tahun 2014 (lihat tabel 3). Para pengusaha cenderung memanfaatkan kebijakan pasar kerja fleksibel yang ramah terhadap proses akumulasi kapital.

Tabel 3. Grafik Jumlah Tentara Cadangan Pekerja di Indonesia, dari tahun 1986-2014

Tentara Cadangan Pekerja atau Surplus Populasi Relatif	1986	1996	2001	2006	2014
Floating	3,368,681	6,350,107*	9,989,881	7,795,291	17,197,634
% Pekerja Formal Perkotaan	55.45	39.26	50.92	37.30	50.62
Latent	26,236,801	22,717,721	25,282,443	30,895,857	27,096,309
% Pekerja Pedesaan	47.94	39.13	46.21	54.12	45.94
Stagnant	4,986,146	8,764,076	13,927,253	15,889,493	19,641,659
% Pekerja Perkotaan	36.64	31.69	38.58	41.41	35.30
Pauperism	1,854,725	4,407,769	8,005,031	10,932,000	7,244,905
Total Angkatan Kerja	70,192,912	90,109,582	98,812,448	106,388,935	121,872,931
Total Tentara Cadangan Kerja	36,446,353	42,239,673	57,204,608	65,512,641	71,180,507
% Angkatan Kerja	51.92	46.88	57.89	61.58	58.41

*data tahun 1997

Sumber: Habibi & Juliawan, 2018: 15

Tabel di atas menunjukkan jumlah tentara cadangan pekerja terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah mereka rata-rata di atas 50% dari total angkatan kerja. Kondisi itu

mempengaruhi relasi kerja di sektor formal (tentara pekerja). John Smith (2016) menunjukkan ketimpangan upah di negara kapitalisme pusat dengan kapitalisme pinggiran tidak

disebabkan oleh hukum ekonomi pasar secara murni, akan tetapi karena pengaruh kekuatan gerakan buruh. Reformasi kesejahteraan yang didapat oleh kelas buruh di Eropa & Amerika tidak bisa dilepaskan karena perjuangan mereka terhadap penguasa. Sementara dalam konteks di negara kapitalisme pinggiran, membludaknya tentara cadangan pekerja secara politis telah mempengaruhi relasi produksi dalam kapitalisme. *Pertama*, mereka menjaga upah real agar tetap rendah dan tidak mengganggu kapasitas akumulasi kapital. Artinya sebagai mekanisme khusus yang membuat buruh tidak menuntut upah secara tinggi. *Kedua*, mendopolitisasi gerakan buruh. Dengan komoditi tenaga kerja yang melimpah dan mengantri untuk masuk menjadi pekerja formal, maka para buruh menjadi banyak yang tidak berserikat. Itu juga didorong oleh kebijakan pasar kerja fleksibel yang diterapkan di Indonesia.

Dari segi upah, menurut data ILO pada tahun 2014 menunjukkan bahwa upah minimum buruh di Indonesia hanya US\$ 171 perbulan. Bandingkan dengan Malaysia yang sebesar US\$ 390 per bulan, Thailand US\$ 392 per bulan, atau bahkan Singapura US\$ 3.527 perbulan (2014). Dengan upah minimum yang rendah, hal itu digunakan oleh pemerintah sebagai bagian dari iklan untuk menawarkan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Mereka berupaya memberi karpet merah bagi kapitalis global guna menanamkan modalnya di Indonesia dengan iming-iming upah buruh yang masih rendah, kemudahan perizinan, dan juga kemudahan-kemudahan lain. Itu karena dalam negara neoliberal, nilai akumulasi kapital dan berjalannya mekanisme pasar diutamakan.

SIMPULAN

Tentara cadangan pekerja atau yang juga disebut sebagai surplus populasi relatif terutama di negara-negara kapitalisme pinggiran memiliki jumlah yang cukup besar, bahkan hampir $\frac{3}{4}$ dari populasi angkatan kerja. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, membludaknya tentara cadangan pekerja itu dikarenakan proses akumulasi primitif yang didorong oleh kerangka moderasi neoliberal.

Proses proletarianisasi di sektor agraria tidak dibarengi dengan perkembangan sektor industri. Diferensiasi kelas di sektor agraria menjadi faktor pendorong proletarianisasi yang membesar saat diterapkannya program revolusi hijau pada saat regim Soeharto berkuasa. Melimpahnya para pekerja tidak dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Akibatnya angkatan kerja tersebut menumpuk cukup besar dan mengantri sedapat mungkin bekerja di sektor formal demi perbaikan kehidupan.

Melihat proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2035, menunjukkan terus meningkatnya usia penduduk dalam angkatan kerja (15 - 65 tahun) sementara angka rasio ketergantungan semakin menurun. "Bonus demografi" disikapi pemerintah dengan kebijakan pasar kerja fleksibel, pelatihan skill, dan peningkatan sekolah vokasi. Kondisi itu akan memperbesar tentara cadangan pekerja terutama yang masuk dalam kategori *floating reserves*. Dengan kebijakan pasar kerja fleksibel, pemerintah seolah tutup mata terhadap permasalahan struktural dalam ekonomi politik Indonesia. Seperti terjadinya proses *depeasantization*, membludaknya pekerja informal, rapuhnya sektor industri, kebijakan ekonomi yang lebih bersandar pada industri ekstraktif, pembangunan neoliberal, dan permasalahan kerentanan pekerja.

Kebijakan pemerintah yang dibimbing oleh moderasi neoliberalisme seperti pasar kerja fleksibel, pelatihan skill, dan peningkatan sekolah vokasi pada dasarnya lebih menguntungkan kaum pemilik modal. Langkah itu memberi ruang yang luas bagi kapital untuk mengekstraksi nilai lebih dari para buruh. Seperti *thesis* Karl Marx bahwa adanya overpopulasi dalam relasi produksi kapitalisme maka akan sangat menguntungkan para kapitalis. Itu terjadi karena adanya peran ganda dalam tentara cadangan pekerja, yaitu untuk menekan tingkat upah dan mendopolitisasi gerakan buruh. Sementara dengan upah murah, maka menjadi keuntungan kaum kapitalis di sisi yang berseberangan terjadi eksploitasi terhadap kaum buruh.

Piranti mekanisme pasar yang menjadi penekanan negara neoliberal, semakin menjadi permasalahan bagi angkatan kerja di Indonesia. Tentara cadangan pekerja harus dihadapkan dengan ketiadaan proteksi negara dan harus bertarung di arena pasar bebas dengan berbagai kerentanan yang dimiliki. Sementara regim negara neoliberal terus berupaya mendesak agar tetap berjalannya akumulasi kapital walaupun dalam berbagai kasus mereka harus dihadapkan dengan kuatnya perlawanan dari rakyat sehingga terjadi berbagai moderasi-moderasi di sana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, 2016. President Jokowi Calls for Establishment of Millions of Vocational Schools. Available at: <http://www.antarane.ws.com/en/news/108240/president-jokowi-calls-for-establishment-of-millions-of-vocational-schools>.
- ASEAN, 2012. *ASEAN Selayang Pandang* 20th ed., Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population Projection 2010-2035*. Jakarta: BPS
- Basu, D., 2012. *The Reserve Army of Labour in the Postwar U.S. Economy: Some Stock and Flow Estimates*. Working Papers.
- Bauman, Z., 2014. *Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts*, Cambridge: Polity.
- BPPN, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Jakarta: BPPN.
- BPS, 2013. Laporan hasil sensus pertanian 2013. *Badan Pusat Statistik*, 1, pp.1-30.
- BPS, 2014. *Proyeksi Penduduk menurut Provinsi, 2010-2035*. Available at: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1274>.
- Dardot, P. & Laval, C., 2013. *The New Way of the World: On Neoliberal Society*, London: Verso.
- Davies, W., 2014. *The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition* 1st ed., London: Sage Publications.
- Denning, M., 2010. Wageless Life. *New Left Review*, 66, pp.79-97.
- Ditjenbun, 2016. Perkebunan Mendorong Produksi Pangan. *Direktorat Jenderal Perkebunan*. Available at: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-403-perkebunan-mendorong-produksi-pangan.html>.
- Duggan, M.C., 2013. "Reserve Army of Labor and Migration". *The Encyclopedia of Global Human Migration*.
- Duménil, G. & Lévy, D., 2013. *The Crisis of Neoliberalism*, Cambridge: Harvard University Press.
- Engels, F., 2010. *The Condition of the Working Class in England*, Moscow: the Institute of Marxism-Leninism. Available at: <https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf>.
- Freire, P., 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES.
- Gamble, A., 2001. Neo-Liberalism. *Capital & Class*, XXV(3), pp.127-134.
- Habibi, M., 2016. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran*, Tangerang: Margin Kiri.
- Habibi, M & Juliawan, B H. 2018. "Creating Surplus Labour: NeoLiberal Transformations and the Development of Relative Surplus Population in Indonesia". *Journal of Contemporary Asia*.
- Hadiz, Vedi R. 2013. "The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy". *Journal of Contemporary Asia*. Volume 43, 2013 - Issue 2.
- Hall, D., Hirsch, P. & Li, T.M., 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas of Southeast Asia*, Hawaii: University of Hawaii Press.

- Harvey, D., 2010. *A Companion to Marx's Capital*, London: Verso.
- Harvey, D., 2003. *The New Imperialism*, New York: Oxford University Press.
- Hayes, A. & Setyonaluri, D., 2015. Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia : A Brief Introduction to Theory and Practice., (April), p.18.
- Hiariej, E., 2003. Teori Negara Marxis. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(Nomer 2, November 2003), pp.261-282.
- ILO, 2002. *Decent Jobs and Informal Economy*, Jenewa: ILO.
- ILO, 2013. *Labour and Social Trends in Indonesia 2012: Working for a Sustainable and Equitable Economy*, Jakarta.
- Juliawan, B.H., 2010. Extracting Labor from Its Owner: Private Employment Agencies and Labor Market Flexibility in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 42 (1), pp.25-52.
- Khanisa, 2016. Strategi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Penelitian Politik*, 13, pp.105-118.
- Lee, Ronald & Mason, A., 2006. What Is the Demographic Dividend? *Finance & Development*. Available at: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/09/basics.htm>.
- Lenin, V., 1999. *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*, Sydney: Resistance Books.
- Malthus, T.R., 1798. An essay on the principle of population, as it affects the future improvement of society. *Contemporary Sociology*, 2(3), p.340.
- Mantra, D., 2014. Menatap Jalan (terjal) Perubahan Struktur Industri Manufaktur Indonesia. In C. H. Pontoh, ed. *Membedah Tantangan Jokowi-JK*. Tangerang: Margin Kiri.
- Marx, K., 1976. *Capital Volume 1: A Critique of Political Economy*, London: Penguin Books.
- Marx, K., 1999. *Wage Labour and Capital*, Marxists(dot)org. Available at: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_Wage_Labour_and_Capital.pdf.
- Mason, A., 2005. Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. *The Extraordinary General Meeting (EGM)*, p.p.22. Available at: http://www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/mason.pdf.
- Neilson, D. & Stubbs, T., 2011. Relative surplus population and uneven development in the neoliberal era: Theory and empirical application. *Capital & Class*, 35(3), pp.435-453.
- Novianto, Arif; Kurniawan, Lukman & Wibawa, Samodra. 2017. "Krisis Kapitalisme 2008 dan Bangkitnya Gerakan Kiri Studi Dinamika Gerakan Partai Syriza di Yunani". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19 no.3, Maret 2016.
- Novianto, Arif. 2015. "Cengkeram Mesin Anti-Politik dan Depolitisasi Pembangunan". *Jurnal Suluh Pergerakan*, Vol 01: 199 - 208.
- Piketty, T., 2014. *Capital in the Twenty-First Century*, London: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Pollin, R., 1998. The "Reserve Army of Labor" and the "Natural Rate of Unemployment": Can Marx, Kalecki, Friedman, and Wall Street All Be Wrong? *Review of Radical Political Economics*, 30(3), pp.1-13. Available at: <http://rrp.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/048661349803000301>.
- Ricardo, D., 2001. *On The Principles of Political Economy and Taxation*, Ontario: Batoche Books. Available at: <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf>.